

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum era Erdogan, politik luar negeri Turki diawali dengan Turki yang menjadi pro terhadap Barat. Sikap Turki ini yang membuat geram negara-negara Islam di Timur Tengah yang kurang dipedulikan oleh Turki. Lebih jauh lagi, pada akhirnya Turki menjadi negara mitra baik Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga menjadikan Turki sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara-negara Barat di Timur Tengah. Turki sendiri merupakan salah satu anggota aliansi militer NATO yang banyak beroperasi untuk mengimplementasikan kepentingan Barat. Turki secara terbuka mengembangkan peran politik luar negerinya dalam dinamika politik regional Timur Tengah khususnya dalam peristiwa *Arab Spring*.

Turki memiliki berbagai sikap terhadap Konflik Arab-Israel. Hal ini dimulai dengan **sikap** Turki sebagai negara anggota Liga Arab yang semula merupakan sekutu Israel, kemudian berbalik menjadi musuh Israel yang sedang berkonflik dengan Arab. Turki merupakan negara sahabat Israel sejak 1949. Turki merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim pertama yang **bersikap mengakui** kemerdekaan Israel yang sedang berkonflik dengan Arab dan merupakan partner perdagangan bebas dengan Israel sejak Januari 2000. Kedekatan Turki dengan Israel sering mengundang kemarahan negara-negara Arab, dimana Arab mengalami konflik dengan Israel. Namun karena satu

peristiwa yaitu “Insiden Flotila dan Nubuat tentang Turki”, Turki langsung berubah seratus delapan puluh derajat menjadi musuh Israel.

Perubahan yang terjadi pada politik luar negeri Turki ini memiliki skala yang tertinggi dalam klasifikasi perubahan **Politik/hubungan Luar Negeri (PLN) Turki**, sehingga menjadi menarik kemudian untuk mencari apa faktor utama yang menyebabkan perubahan politik luar negeri Turki ini. Keanggotaan Uni Eropa yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama politik luar negeri Turki dan sebagai manifestasi ide politik identitas Turki sebagai negara Eropa, tidak terdengar lagi tindak tanduknya setelah stagnasi negosiasi keanggotaan Uni Eropa di tahun 2008. Sejak krisis di Gaza tahun 2008, Turki banyak mengkritik keras kebijakan Israel. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras tindakan Israel dalam konferensi Forum Ekonomi Dunia di Davos September 2009. Pada tanggal 11 Oktober 2009, hubungan menjadi lebih tegang ketika Israel dilarang mengikuti latihan militer bersama di Anatolia – Turki. Semula latihan akan dilaksanakan bersama Turki, Israel, Amerika Serikat, dan Italia. Namun, Turki menolak untuk mengizinkan Israel untuk menghadiri. Sebagai tanggapan atas hal itu, Amerika Serikat kemudian menarik diri dari latihan tersebut.

Pada era Erdogan, kebijakan luar negeri Turki yang cenderung pada Timur Tengah telah membangkitkan semangat rakyat Timur Tengah yang sekarang sedang mengalami gejolak demokratisasi. Hal ini berarti Turki sudah kembali pro pada Timur Tengah. Hal itu terlihat ketika Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Mesir untuk melakukan serangkaian pertemuan

dengan menteri luar negeri Mesir, Tunisia dan Libya. Namun, seiring dengan perkembangan isu-isu Dunia Islam khususnya untuk wilayah Timur Tengah, beberapa kebijakan Turki belakangan ini lebih independen dan berani keluar dari tekanan kepentingan Barat. Sebelumnya pada 2002 silam. Partai Keadilan dan Pembangunan yang merupakan Partai Islam Moderat memenangi Pemilihan Umum dan Recep Tayib Erdogan berhasil menjadi Perdana Menteri Turki dari partai tersebut. Perjalanan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Erdogan sangat panjang. Erdogan bersama Abdullah Gul mendirikan Partai AKP. Partai tersebut memimpin negara sebagai dengan mendapat dukungan dari rakyat sehingga saat ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Republik Turki dijalani dengan dua model, yakni antara Kemalisme (diciptakan oleh Attaturk) dan pendekatan Strategic Depth yakni pengembalian kejayaan Usmani (Neo-Ottomanisme) oleh Erdogan dan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menyadari betul pentingnya sejarah dan warisan kultural dalam menjalankan kepentingan nasional dengan kebijakan *zero problem with neighbors*..

Perubahan politik luar negeri Turki dari pro Israel kepada politik luar negeri Turki yang pro Palestina disebabkan oleh persepsi atau pandangan politik luar negeri Turki di Timur Tengah berubah saat di bawah kepemimpinan Erdogan. Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki mencetuskan strategi yang dikenal sebagai **Al-Amq Al-Istratijii** (strategi politik intensif). Dimana politik ini menekankan kepada politik yang berpijak dari kondisi geostrategis Turki. Strategi Al-Amq Al-Istratijii atau strategi

politik intensif merupakan strategi politik yang menekankan kepada politik yang berpijak dari kondisi geostrategis Turki dan sejarahnya yang panjang serta kebudayaan yang mendorong Turki menempati posisi strategis dalam panggung politik internasional, terutama di Timur Tengah. Dengan demikian, itulah strategi politik Turki yang baru, yaitu menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan melainkan memiliki persepsi terhadap keterbukaan dan menerapkan politik *soft power* kepada negara tetangga.

Pada pemerintah periode kedua setelah Erdogan kembali terpilih pada 2007 lalu, Turki mulai ikut terlibat aktif terhadap isu-isu Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina. Puncaknya adalah ketika para aktivis kemanusiaan yang diberangkatkan dari Turki dengan Kapal Navi Marmara berusaha untuk memberi bantuan kepada warga Palestina, namun diserang oleh tentara Israel. Pada insiden tersebut beberapa warga Turki tewas akibat terkena peluru militer Israel. Kejadian tersebut menuai simpati dari masyarakat internasional dan Israel mendapat banyak kecaman. Kondisi dalam negeri Turki sendiri, warga meminta kepada pemerintah Turki agar mendesak Israel bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Turki akhirnya secara resmi meminta Israel untuk bertanggung jawab, namun seruan tersebut ternyata tidak mendapat respon positif dari Israel dan pada akhirnya membuat hubungan diplomatik kedua negara tidak harmonis. Dampak dari peristiwa tersebut ternyata mengandung konsekwensi yang panjang. Salah satunya yaitu Turki secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina.

Dalam tatanan kebijakan internasional secara historis, Turki adalah negara yang sangat berbeda dari negara Arab lainnya. Ketika dunia Arab masih mempertahankan eksistensi dan konfliktual Sunni-Syiah, Turki bahkan berusaha merangkul seluruh dunia Arab menuju perdamaian. Oleh karenanya di negara ini, dapat memberikan contoh keberhasilan eksistensi sufisme kedalam sendi pemerintahan negara yang demokratis, stabil, damai dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi pandangan politik luar negeri Turki di Timur Tengah berubah saat di bawah kepemimpinan Erdogan.

Persepsi atau pandangan politik luar negeri Turki di Timur Tengah berubah saat di bawah kepemimpinan Erdogan. Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki mencetuskan strategi yang dikenal sebagai Al-Istratijii (strategi politik intensif). Strategi Al-Amq Al-Istratijii atau strategi politik intensif adalah strategi politik yang menekankan kepada politik yang berpijak dari kondisi geostrategis Turki dan sejarahnya yang panjang serta kebudayaan yang mendorong Turki menempati posisi strategis dalam panggung politik internasional, terutama di Timur Tengah. Dengan demikian, itulah strategi politik Turki yang baru, yaitu menjamin keselamatan dan keamanan nasional Turki tanpa melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan melainkan memiliki persepsi terhadap keterbukaan dan menerapkan politik *soft power* kepada negara tetangga. Perubahan orientasi kebijakan Luar Negeri Turki pada Barat mulai terlihat ketika beberapa kali Turki terlibat konflik dengan salah satu sekutu Barat yang berada di Timur Tengah, yaitu Israel. Negara Israel yang notabeneanya adalah mitra Turki di

Timur Tengah mulai terganggu kepentingannya ketika Turki ikut campur dalam konflik Palestina-Israel.

Berkaitan dengan politik luar negeri Turki terhadap Israel. Pada pemerintah periode kedua setelah Erdogan kembali terpilih pada 2007 lalu, Turki mulai memihak kepada Palestina dengan ikut terlibat aktif terhadap isu-isu Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina. Pada awal-awal pemerintahan Erdogan, Turki juga mempertahankan kedekatannya dengan Israel. Bagi kepentingan geostrategis Uni Eropa, Turki tidak dapat digantikan negara manapun, walaupun Perancis dan Jerman tidak mampu melihat hal ini. Politik kedua negara tersebut menyangkut Turki tidak berkembang dan tidak berorientasi pada hasil. Namun demikian Turki tidak akan keluar dari perundingan keanggotaan dalam Uni Eropa. Puncaknya adalah ketika para aktivis kemanusiaan yang diberangkatkan dari Turki dengan Kapal Navi Marmara berusaha untuk memberi bantuan kepada warga Palestina, namun diserang oleh tentara Israel. Pada insiden tersebut beberapa warga Turki tewas akibat terkena peluru militer Israel. Kejadian tersebut menuai simpati dari masyarakat internasional dan Israel mendapat banyak kecaman. Kondisi dalam negeri Turki sendiri, warga meminta kepada pemerintah Turki agar mendesak Israel bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Turki akhirnya secara resmi meminta Israel untuk bertanggung jawab, namun seruan tersebut ternyata tidak mendapat respon positif dari Israel dan pada akhirnya membuat hubungan diplomatik kedua negara tidak harmonis. Dampak dari peristiwa

tersebut ternyata mengandung konsekwensi yang panjang. Salah satunya yaitu Turki secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina.

Republik Turki sangat tegas terhadap Israel dalam kaitannya menanggapi penyerangan negara Zionis Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang telah menewaskan 9 warganya. Para petinggi pemerintah Turki sangat kompak menentang Israel. PM. Recep Thayyib Erdogan bersama Presiden Turki Abdullah Ghul, Menlu Turki Ahmed Novotoglu sepakat untuk menuntut Israel bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Turki menunjukkan sikapnya yang sangat berani, yaitu dengan mengusir diplomat Israel dari negaranya. Lebih jauh lagi, secara sepihak pemerintah Turki membekukan semua perjanjian dengan Israel sebelum negara Yahudi itu minta maaf secara resmi atas aksi penyerangan itu. Turki juga menuntut agar Israel segera membuka blokadanya terhadap rakyat Palestina yang dinilai sebagai tragedi kejahatan kemanusiaan paling keji.

Berkaitan dengan politik luar negeri Turki terhadap Palestina. Pemerintahan Turki di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Recept Tayyip Erdogan dari Partai Aliansi Keadilan dan Pembangunan (AKP), telah mengambil keputusan penting dalam kebijakan luar negerinya: Menjalin persekutuan dengan negara-negara Islam dan memberikan dukungan penuh terhadap Palestina. Hal ini terutama setelah Pemerintahan Turki di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dari Partai Aliansi Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang menerapkan arah kebijakan luar negeri Turki yang cenderung pro negara Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk-bentuk strategi Al-Amiq Al-Istiraji Turki terhadap masalah konflik Israel-Palestina?

C. Kerangka Teori

Guna menjawab permasalahan tersebut diatas penulis mencoba menggunakan konsep dan teori sebagai berikut.

1. Pendekatan Politik Luar Negeri oleh Valerie M. Hudson

Politik atau kebijakan luar negeri suatu negara perlu dianalisa untuk mengetahui sejauh mana dan apa yang mempengaruhi sehingga kebijakan itu dibuat. Karena dibutuhkan sebagai premis dasar bahwa hubungan internasional membahas bagaimana pengambil keputusan, baik individu bertindak sendiri-sendiri atau dalam kelompok, atau bahkan analisis kebijakan luar negeri terletak di persimpangan dari semua ilmu sosial dan bidang kebijakan, dan pengembangan faktor yang lain yang berkaitan dengan hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.

Bentuk-bentuk interaksi politik luar negeri dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara. **Bentuk-bentuk interaksi politik luar negeri atau interaksi ini dapat berupa;** kerjasama

(*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*). Tentu yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama **politik luar negeri**. Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan. konflik (pertentangan) dan juga kompetisi (persaingan) merupakan hal-hal yang tidak mudah terhindarkan dalam interaksi hubungan internasional, meskipun awalnya terbentuk baik dalam suatu kerjasama sekalipun, tetapi jika salah satu pihak sudah merasakan adanya tekanan ataupun ancaman bagi dirinya, maka tidak menutup kemungkinan pertentangan itupun akan muncul.

Kemudian secara partikular dibagi menjadi lima aspek dalam **konteks teori pendekatan kebijakan luar negeri** adalah:

- a. a. *Individual Characteristics;*
- b. b. *Perceptions;*
- c. c. *Society and Culture;*
- d. d. *The Polity;*
- e. e. *The International System;*

Pertama, *Ideosincretic/individual characteristic* adalah Psikologi Politik yang dapat membantu seseorang dalam memahami penentuan dan arah pemimpin. Meliputi kondisi stres yang tinggi, ketidakpastian yang tinggi, posisi dominan dari kepala negara dalam Keputusan Kebijakan Luar Negeri membuat karakteristik pribadi individu akan menjadi penting dalam memahami pilihan kebijakan luar negeri. Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologi

yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal (*interpersonal*) yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang akan menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda pula, meskipun di tempat yang sama.

Landasan kepribadian seorang individu adalah keadaan psikologis individu tersebut dan nilai diri (*self value*) yang dimiliki. Keadaan psikologis ini melingkup pada keyakinan diri, sumber kendali diri, dan orientasi diri pada pembelajaran atau kinerja atau memimpin. Nilai diri melingkup pada tingkatan religi atau kecerdasan spiritual yang mengarahkan pada perilaku baik atau buruk. Karakteristik pribadi lebih mencerminkan pada bawaan fisik seorang individu yang tampak, seperti humoris, mudah bergaul, dan terbuka. Landasan kepribadian tersebut akan menjadi hal yang krusial dimiliki oleh **seorang pemimpin** yang efektif. Hal ini karena pada dasarnya kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja organisasinya. Neihoff dalam Riyadiningsih mengatakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) merupakan kunci untuk meningkatkan produktifitas dan inovasi organisasi. Hasil penelitian Riyadiningsih juga menyatakan bahwa tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh berbagai ukuran (*size*) organisasi mempengaruhi kinerja organisasi.

Seorang pemimpin mampu mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kemampuan, keadaan psikologis, dan karakter pribadinya. Faktor-faktor ini bukan merupakan sesuatu yang statis dan permanen, tetapi bersifat dinamis dan dapat dikembangkan. Proses pembelajaran sosial (*social learning*) dan pengalaman hidup merupakan determinasi perkembangan faktor-faktor tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan kejiwaan yang terinternalisasi selama seorang individu melakukan pembelajaran diri.

Kondisi psikologis diuraikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut. Kondisi psikologis dalam hal meliputi sumber kendali diri (*locus of control*), keyakinan diri (*self efficacy*), dan orientasi tujuan (*goal orientation*). Kondisi psikologis ini merupakan landasan kepribadian seorang individu. Artinya kepribadian seorang individu bisa tercermin dari bagaimana kondisi psikologisnya. *Locus of control* merupakan salah satu variabel kepribadian (*personality*). Rotter dalam Riyadiningsih mendefinisikan *locus of control* sebagai suatu keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk mengontrol nasib (*destiny*) sendiri. Individu yang memiliki keyakinan bahwa dia mampu mengontrol *event-event* yang terjadi dalam kehidupannya, dikatakan individu tersebut memiliki *internal locus of control*. Sementara individu yang memiliki keyakinan bahwa lingkunganlah yang mengontrol *event-event* yang terjadi dalam kehidupannya maka dikatakan individu tersebut memiliki *external locus of control*. Jika seorang individu yang bertindak sebagai **seorang**

pemimpin mempunyai *internal locus of control* maka dia memiliki persepsi bahwa lingkungan dapat dikontrol oleh dirinya sehingga dia mampu melakukan perubahan. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang *agent of change* dan sekaligus sebagai seorang *entrepreneur*. Hal ini bisa dipahami karena *internal locus of control* berhubungan dengan sikap aktif proaktif dalam melakukan perbaikan.

Konsep diri (*self Concept*) adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. *Self concept* merupakan konstruk multi dimensional mengenai persepsi individu terhadap dirinya sendiri terkait dengan sejumlah karakteristik pribadi seperti pendidikan, gender, ras, dan yang lain. *Self concept* merupakan sebuah model internal dari self assessment yang tidak hanya terbatas pada penilaian tentang kepribadian seorang individu tetapi juga mengenai keahlian, kemampuan, hobi, dan karakteristik pribadinya. Sedang menurut Demidenko, dkk., *self concept* merupakan sebuah model yang menyangkut yang terkait dengan *self esteem*, *stability*, dan *self efficacy*. Tingkah laku nyata seorang individu sejalan dengan konsep diri yang dimilikinya. *Continous self improvement* di segala bidang kehidupan seorang individu bertolak dari *self concept improvement*. Dengan demikian, jika seorang individu mempunyai motivasi untuk memperbaiki kinerja dalam kepemimpinannya dan efektivitas setiap tindakannya, maka harus dirunut dari evaluasi terhadap konsep dirinya. Hal ini karena *Selfconcept* seorang individu mendahului dan

memprediksi tingkat kinerja dalam kepemimpinannya dan efektivitas setiap tindakan individu bersangkutan.

Kedua, *Perceptions* sebagai peran persepsi dan gambaran dalam kebijakan luar negeri adalah agenda penelitian yang sangat penting dalam analisis kebijakan luar negeri seperti analisa dan perkembangan kebijakan setiap tahunnya. Ketiga, *Society and Culture* sebagai Studi tentang budaya dan identitas yang menjadi determinan dalam negara, studi ini memulai kebangseseorangnya setelah berakhirnya Perang Dingin disertai topik tentang studi keamanan, dan *postmodernisme*. Keempat, *The Polity*, menjelaskan kelompok-kelompok tertentu dalam Negara dapat mempengaruhi serangkaian kebijakan luar negeri, situasi keamanan dan stabilitas kawasan. Kelima, *International System*, berupa terdapat keadaan dan kesepakatan internasional terhadap situasi yang terjadi di dunia internasional.

Secara dasar teori, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memeberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu seorang pemimpin dan persepsi persepsi yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dikemukakan oleh sekelompok peneliti yang berasal dari Universitas Princeton seperti Adelbert Ames, Jr, Hadley Cantril, Edward Engels, William H. Ittelson dan Adelbert Amer, Jr. Mereka mengemukakan konsep yang disebut dengan pandangan transaksional (*transactional view*). Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pengamat dan dunia seseorang merupakan partisipan aktif dalam tindakan persepsi. Para pemikir transaksional telah mengembangkan sejumlah bukti yang meyakinkan bahwa persepsi didasarkan pada asumsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain harapan pengalaman masa lalu seorang pemimpin tersebut, dan keadaan psikologis yang mana menciptakan kumpulan perseptual. Selain hal tersebut masih ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi, yaitu: 1. Hal yang paling berpengaruh terhadap persepsi adalah perhatian, karena perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran, pada saat stimulus lainnya melemah. Dalam stimulus mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain intensitas dan pengulangan. Diri orang yang membentuk persepsi itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap kepentingan, minat, kebutuhan, pengalaman,

harapan dan kepribadian. 2. Stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu. Stimulus yang dimaksud mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. 3. Faktor situasi dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana dan lain-lain.

Di dalam pembelajaran persepsi seseorang perlu juga mengenal tentang kekonstanan persepsi (**konsistensi**), yaitu persepsi bersifat tetap yang dipengaruhi oleh pengalaman. Kekonstanan persepsi tersebut meliputi bentuk, ukuran, dan warna. Salah satu contoh kekonstanan persepsi, yaitu ketika seseorang meminum susu ditempat yang gelap, maka seseorang tidak akan menyebut warna susu tersebut hitam, melainkan seseorang akan tetap menyebut warna susu adalah putih meski di dalam kegelapan warna putih sebenarnya tidak tampak. Begitu pula saat seseorang melihat uang logam dari arah samping, seseorang tetap akan menyebut uang logam tersebut berbentuk bundar. Padahal apabila seseorang melihat dari samping, maka sebenarnya seseorang melihat uang logam tersebut berbentuk pipih. Itulah yang disebut dengan kekonstanan persepsi, seseorang memberikan persepsi terhadap suatu obyek berdasarkan pengalaman yang seseorang peroleh sebelumnya.

Dalam kasus Turki, penelitian ini menggunakan *individual characteristic* sebagai eksekutor/fasilitator yang berawal dari adanya keinginan kembali akan kebesaran bangsa pada masa lalu, berupa pengaruh kebangseseorangn kembali sufisme-usmani. Pola ini kemudian ditandai dengan adanya gerakan masyarakat sipil untuk memulihkan kegiatan ekonomi pasca

kudeta Perdana Menteri Necmetin Erbakan yang secara kultural praktik memiliki hubungan dengan ideologi Islamis sebagai negara mayoritas Muslim. Dalam ruang politik yang semakin terbuka di era Perdana Menteri Erdogan, gerakan Islamis masyarakat terbukti menjadi elemen penting dalam pertumbuhan masyarakat sipil di Turki. Jadi kemudian dalam perkembangannya, keadaan ini diberdayakan oleh para otoritas pembuat kebijakan seperti Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul dan Ahmet Davutoglu sesuai dengan *national self-image and culture* yang sedang berkembang dalam bentuk gerakan Islamis sehingga menghasilkan kebijakan nasional maupun kebijakan luar negerinya yang kemudian berdampak pada segi ekonomi, kebudayaan, politik dan hubungan kerjasama Turki dengan Uni Eropa dan dunia Arab.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Pada dasarnya perumusan kebijakan luar negeri memerlukan analisis yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek internal namun juga memperhatikan kondisi eksternal suatu negara. Lebih lanjut menurut Rosenau, apabila seseorang mengkaji kebijakan luar negeri maka seseorang akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal live*) dan kebutuhan eksternal (*external needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditunjukkan

untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa

Politik domestik dan lingkungan eksternal merupakan faktor esensial dimana perilaku dan interaksi negara pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi internasional yang menyertainya. Dalam membangun hubungannya negara lain, setiap negara tentunya harus terlibat dalam sistem yang dibangun, baik itu dalam kerangka norma dan aturan ataupun organisasi internasional. Pendapat ini berkembang untuk menanggapi pemikiran mengenai struktur internasional yang anarki yang kemudian melahirkan pendekatan neo-realis. Akan tetapi pendekatan neo-realis juga kemudian mendapat sejumlah kritik yang dianggap sangat materil dan menyampingkan unsur nilai dan ide yang dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri.

Perceptions sebagai peran persepsi dan gambaran dalam kebijakan luar negeri adalah agenda penelitian yang sangat penting dalam analisis kebijakan luar negeri seperti analisa dan perkembangan kebijakan setiap tahunnya. Adanya upaya Erdogan dalam memimpin Republik Turki untuk melanjutkan kebijakan Zero Enemy dengan seluruh negara dunia menurut prinsip Sufisme yang cinta damai. Erdogan mengupayakan ideologi ini sebagai dasar terciptanya keamanan, ketentraman dan toleransi beragama.

D. Hipotesa

Berdasarkan problem dan kerangka dasar pemikiran yang ada di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesa mengenai bentuk strategi Al-Amq Al-Istratijii yang diterapkan Turki terhadap konflik Israel-Palestina adalah:

1. Strategi Al-Amq Al-Istratijii yang diterapkan di Turki pada masa pemerintahan Erdogan menekankan pada bentuk politik yang berpihak pada goestrategis Turki sehingga pola politik luar negari Turki cenderung mendukung negara yang berada dekat dengan Turki secara geografis dan sejarah yang akan menguntungkan posisi Turki sebagai salah satu negara kuat di Timur Tengah.
2. Dalam melihat konflik Israel-Palestina, Strategi Al-Amq Al-Istratijii yang digunakan oleh Turki cenderung menunjukkan sikap netral dalam artian menempatkan Turki sebagai negara Timur Tengah yang menjunjung tinggi perdamaian. Yang dilakukan Turki dalam hal ini adalah mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan memberi dukungan kemanusiaan tapi di sisi lain Turki tidak menyatakan perang terhadap Israel meskipun pernah memberikan reaksi keras dengan melakukan pembekuan kerjasama dengan Israel.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.1. Menganalisis perubahan politik luar negeri Turki di era kepemimpinan Erdogan yang sebelumnya pro Israel menjadi pro Palestina.

2.2. Menganalisis bagaimana masa depan politik luar negeri Turki di era kepemimpinan Erdogan berkaitan dengan perubahan politik luar negeri Turki di era kepemimpinan Erdogan yang sebelumnya pro Israel menjadi pro Palestina.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bidang pengetahuan internasional mengenai politik luar negeri Turki di era kepemimpinan Erdogan.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai politik luar negeri Turki di era kepemimpinan Erdogan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan buku-buku kepustakaan berupa jurnal-jurnal, koran-koran, internet, buku-buku, dan media informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan dengan paparan secara deskriptif.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dalam bentuk kalimat yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Merupakan pendahuluan proposal yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, hipotesa, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pemerintahan Turki Sebelum Tayyip Erdogan. Pada bab II ini akan diuraikan haluan politik luar negeri Turki Sebelum Tayyip Erdogan. Kemudian akan diuraikan politik Luar Negeri Turki terhadap Arab-Israel Sebelum Tayyip Erdogan.

BAB III Perubahan Politik Luar Negeri Turki terhadap Palestina. Pada bab III ini akan diuraikan tentang kemenangan Erdogan, kemudian strategi Al-amiq Al-istiraji.

BAB IV Sebab-Sebab Perubahan Politik Luar Negeri Turki di Era Kepemimpinan Erdogan yang Sebelumnya Pro Israel Menjadi Pro Palestina. Pada bab akan dianalisis mengenai bentuk-bentuk dukungan Turki terhadap Palestina, kemudian dan dilanjutkan pembahasan reaksi keras Turki terhadap

Israel. Bab IV ini ini sekaligus untuk menjawab atau pembuktian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya

BAB V Kesimpulan. Berisi penutup sebagai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan.